

Pengaruh Belanja Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara

Yundi Kurnia Indah Sari¹, Aslan², Yuliansyah³

¹²³Fakultas Ekonomi Universitas Kaltara

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 17, 2025

Revised January 19, 2025

Accepted January 29, 2025

Available online 31 January, 2025

Kata Kunci:

Belanja Infrastruktur, Pembangunan Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi.

Keywords

Infrastructure Spending, Infrastructure Development, Economic Growth



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Melihat dari keterlanjutannya kepemimpinan yang melebihi dari Pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu syarat utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk menganalisis besarnya belanja pembangunan infrastruktur ekonomi dan mengidentifikasi dan mengevaluasi besaran belanja pembangunan infrastruktur ekonomi yang telah dialokasikan di Kalimantan Utara dan (2) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh belanja infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan hasil analisis menggunakan regresi sederhana yakni; (1) Pembangunan infrastruktur baik sektor jalan, transportasi dan listrik memberikan dampak yang positif pada aspek sosial dan pembangunan manusia, dengan demikian pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan utara bukan hanya sekedar pembangunan fisik tetapi juga merupakan strategi investasi dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (2) Pembangunan infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Kalimantan utara. Artinya peningkatan atau penurunan pembangunan infrastruktur berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan atau penurunan

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan utara.

ABSTRACT

Infrastructure development is one of the main requirements for achieving rapid and sustainable economic growth. This research aims to: (1) To analyze the amount of spending on economic infrastructure development and identify and evaluate the amount of spending on economic infrastructure development that has been allocated in North Kalimantan and (2) To find out how infrastructure spending influences economic growth in North Kalimantan Province. Based on the results of the analysis using simple regression, namely; (1) Infrastructure development in the road, transportation and electricity sectors has a positive impact on social aspects and human development, thus infrastructure development in North Kalimantan Province is not just physical development but is also an investment strategy in economic growth and community welfare. (2) Infrastructure development has a positive and significant effect on economic growth in North Kalimantan province. This means that an increase or decrease in infrastructure development has a direct effect on the increase or decrease in economic growth in North Kalimantan Province.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator dalam mengukur keberhasilan suatu perekonomian dan baik buruknya kualitas kebijakan pemerintah serta tinggi atau rendahnya mutu aparatnya di bidang ekonomi (Widayati : 2010). Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat yang ditunjukkan oleh besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek. Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern, pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis di dasarnya pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonom klasik antara lain Adam Smith, David Ricardo. Teori lain yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori ekonomi modern. Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan salah satu teori pertumbuhan ekonomi modern, teori ini menekankan arti pentingnya pembentukan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi

*Corresponding author

Email: yundiindah123@gmail.com¹, aslan.kaltara@gmail.com², yuliansyahian1@gmail.com³

maka akan semakin baik perekonomian, investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat tetapi juga terhadap penawaran agregat. peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang melebihi tingkat pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk. Salah satu faktor modal yang vital yaitu sarana infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan penyediaan infrastruktur yang pada prinsipnya dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama yaitu penyediaan berdasarkan kebutuhan (*demand approach*), termasuk memelihara prasarana infrastruktur yang sudah ada menjadi suatu kebutuhan. Kedua yaitu penyediaan yang dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi (*supply approach*). Kedua pendekatan tersebut tergantung pada dana penyediaan. Ketika dana terbatas, maka penyediaan infrastruktur lebih diprioritaskan pada pendekatan pertama. Sedangkan ketika keadaan ekonomi sudah membaik, maka penyediaan prasarana infrastruktur dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Simanjuntak : 2015). Literatur teori pertumbuhan ekonomi baru menjelaskan pentingnya pengaruh infrastruktur dalam mendorong perekonomian. Teori ini memasukkan infrastruktur sebagai input dalam mempengaruhi output agregat. Selain itu dengan adanya pembangunan infrastruktur membuat kemajuan teknologi sebagai eksternalitas dari pembangunan infrastruktur (Hulten dan Schwab : 1991). Penyediaan infrastruktur dapat menciptakan peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan kapasitas produksi, misalnya ketersediaan dan reliabilitas ketersediaan air oleh jaringan irigasi.

Ketimpangan pendapatan masyarakat di suatu wilayah juga dapat disebabkan oleh ketersediaan infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi dan akses kepada sumber-sumber produksi. Ketersediaan jaringan jalan akan membuka dan menumbuhkan kegiatan ekonomi di daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara. Program pembangunan infrastruktur adalah bagian dari pendukung program di sektor lain. Dengan adanya pembangunan maka dapat memacu pertumbuhan ekonomi, serta terciptanya lapangan pekerjaan. Pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh. Kementerian PUPR sebagai penyelenggara program pembangunan infrastruktur bertanggung jawab atas pembangunan sumber daya air, jalan dan jembatan, keciptakarya, serta perumahan.

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (3). Ndraha (1987 : 110) menyatakan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan masyarakat amat luas, berawal dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal yang bersifat ideologi dan spiritual dengan ini peran pemerintah akan mempunyai wewenang dan kemampuan seseorang tersendiri untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seorang pemimpin, karena tuntutan dari tugas pokok dan fungsinya sendiri bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dilingkungan masyarakat maupun pemerintah. Rasyid (2000 : 48) menyampaikan bahwa pelaksanaan pemerintahan yang baik selalu berpatokan pada tugas pokok dan fungsi yang diatur oleh peraturan yang ditentukan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tergantung pihak pemimpinnya sendiri. Dalam hal ini kegiatan yang harus dilaksanakan / dijalankan terdapat tiga fungsi yang hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Dalam hubungan tersebut menegaskan bahwa, pelayanan yang baik akan membuahkan keadilan bagi masyarakat bangsa dan negara, sedangkan pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran dalam masyarakat.

Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien, potensi maupun karakteristik dan kebutuhan masyarakat di daerah Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana APBD secara transparan, efisien, efektif. APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah daerah yang didalamnya selain mencakup sumber-sumber pendapatan daerah tetapi juga berbagai belanja pemerintah. Belanja pemerintah memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi alokasi dan fungsi redistribusi yang salah satu fungsinya yaitu alokasi untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta. APBD disusun oleh suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya APBD, maka suatu daerah dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, lalu membelanjakan dan tersebut sesuai program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam peraturan daerah setempat. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: belanja daerah adalah semua

kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Lebih lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa “belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota”. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021- 2025, visi yang diusung adalah “Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”. Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka dirumuskan misi yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan yaitu:

1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja;
3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan;
4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;
7. Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di Provinsi Kalimantan Utara;
8. Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Melinial dalam pembangunan;
10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional.
12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota;
13. Mewujudkan pembangunan yang berbasis RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun.
14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Krayan, Kabupaten Apo Kayan.

Salah satu Misinya Yaitu Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir, dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan.

Provinsi Kalimantan Utara mungkin mengalami keterbatasan dalam infrastruktur yang sudah ada, seperti jaringan jalan yang kurang memadai, pelabuhan yang belum optimal, atau ketidaksempurnaan dalam infrastruktur energi. Pemerintah sendiri membeberkan masih ada sejumlah wilayah di Kalimantan utara yang sulit diakses melalui jalur darat. Bahkan masih ada beberapa wilayah yang hanya bisa dilalui jalur udara menggunakan pesawat udara seperti pada daerah Krayan. Kondisi seperti ini hampir tersebar di seluruh wilayah Kabupaten yang ada di Kalimantan Utara. Sebagai contoh adalah jalan poros ke Desa Tanah Kuning, Mangkupadi dan sekitarnya pada Kabupaten Bulungan yang masih dalam kondisi perlu perbaikan dan pembangunan yang lebih baik lagi guna meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, apalagi daerah ini merupakan salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Bulungan yaitu berupa

pantai. Pada intinya yang menjadi masalah utama di Kalimantan Utara adalah infrastruktur. Kondisi ini dapat menjadi hambatan untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi. Jika infrastruktur di Provinsi Kalimantan Utara tidak memadai, daya tarik investasi dari sektor swasta mungkin rendah. Kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena kurangnya investasi yang dapat merangsang aktivitas ekonomi lokal (Sumber <https://kaltara.bpk.go.id/> diakses pada tanggal 2 Mei 2024)

Dalam mengoptimalkan potensi pembangunan infrastruktur menggunakan alokasi dana pemerintah yang telah diberikan dari pusat untuk melakukan peningkatan, pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan sarana dan prasarana umum, maupun pembangunan non-infrastruktur, seperti potensi daya, wisata, pendidikan, dan lain-lainnya. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata dalam pemerintahan Kalimantan Utara mendukung pelaksanaan alokasi pembangunan infrastruktur.

TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Adam Smith pertumbuhan ekonomi dapat dicapai secara maksimum. Pertumbuhan ekonomi bisa dicapai dengan melibatkan dua unsur, yaitu: Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output total. Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan Ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara (Daerah) untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan (Jhingan, 2007:57) Bahwa Pertumbuhan Ekonomi diartikan sebagai Kenaikan GDP/GNP tanpa memandang, apakah kenaikan itu lebih besar atau kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Suatu perekonomian baru dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang jika pendapatan perkapita menunjukkan kecenderungan dalam jangka panjang naik.

Menurut Sukirno (2002:10) Pertumbuhan Ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat, dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan yang cepat apabila dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup berarti, sedangkan dikatakan mengalami pertumbuhan yang lambat apabila dari tahun ke tahun mengalami penurunan atau fluktuatif.

Pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk mengestimasi besarnya penerimaan daerah (pajak dan redistribusi) yang akan diterima. Selanjutnya dengan bertambahnya penerimaan pemerintah akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali (Fadly, 2016). Pertumbuhan ekonomi dapat menjelaskan bagaimana kondisi perekonomian suatu wilayah mengalami peningkatan. Teori tersebut perlu dipahami karena dapat menjadi bahan rujukan bila sewaktu-waktu perlu membuat kebijakan ataupun memprediksi kondisi ekonomi. Pasalnya, teori-teori yang ada merupakan hasil pengalaman empiris para ahli ekonom di masa lalu terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun Beberapa Teori pertumbuhan Ekonomi sebagai berikut:

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi klasik adalah sudut pandang yang diungkapkan oleh para ahli dengan fokus pada jumlah penduduk. Berikut teori-teorinya (Sumber <https://www.ocbc.id/id/article/2023/02/08/teori-pertumbuhan-ekonomi>, diakses pada tanggal 2 Mei 2024) : Adam Smith, Adam Smith merumuskan teori pertumbuhan ekonomi miliknya dalam buku berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Menurut pandangan Adam Smith, pertambahan populasi penduduk akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Pertambahan tersebut diyakini dapat memperluas pasar dan diversifikasi maupun spesialisasi peran.

David Ricardo, Bertolak belakang dengan pendapat Adam Smith, David Ricardo berpendapat bahwa pertambahan populasi justru mengakibatkan kelebihan tenaga kerja sehingga upah yang diberikan menurun. Upah tersebut digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum para pekerja. Alhasil, kondisi ekonomi akan stagnan. Teori pertumbuhan ekonomi klasik ini dirumuskan oleh David Ricardo dalam buku berjudul *The Principles of Political and Taxation*.

Thomas Robert Malthus, Robert Malthus memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan David Ricardo, di mana menurutnya pertumbuhan populasi dapat menyebabkan krisis pangan. Akibatnya, harga pangan di pasaran pun akan meningkat karena tidak semua orang memiliki akses terhadap pangan.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik

Dalam teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, faktor pertumbuhan ekonomi negara dilihat dari tiga hal, yaitu penduduk, kewirausahaan, dan investasi. Berikut teori-teorinya:

Joseph Schumpeter

Menurut Joseph Schumpeter, ekonomi suatu negara dapat meningkat apabila pengusaha membuat inovasi dan kombinasi baru terkait proses produksi maupun investasi bisnisnya. Dalam teori ini, kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan masyarakat yang mampu melihat peluang usaha dan memperluas usaha. Dengan demikian, tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap jumlah tenaga kerja yang selalu bertambah di setiap tahun.

Robert M. Solow

Dalam pandangan Robert M. Solow, ada empat faktor utama produksi, yaitu manusia, teknologi modern, akumulasi modal, dan hasil. Solow berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif ataupun negatif. Oleh karenanya, pertumbuhan tersebut harus dimanfaatkan sebagai sumber daya produktif. Selain itu, Solow juga berpendapat bahwa tingkat tabungan berpengaruh pada modal dan hasil. Jika tingkat tabungan tinggi, modal dan hasil juga ikut meningkat.

R. F. Harrod dan Evsey Domar

Harrod-Domar memandang bahwa perlu ada pembentukan modal atau investasi demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil. Jadi, semakin banyak ketersediaan modal, produksi barang dan jasa juga dapat mengalami peningkatan.

Belanja Pemerintah

Pengertian Belanja Pemerintah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 belanja merupakan semua kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Halim (2004) belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawab masyarakat dan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa belanja pemerintahan merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode anggaran yang berupa arus aktiva keluar untuk pelaksanaan kewajiban wewenang dan tanggungjawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2005 belanja merupakan suatu pengeluaran dari rekening kas umum Negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Menurut Peraturan menteri dalam Negeri No.13 Tahun 2006 belanja merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mengurangi kekayaan bersih pada periode yang bersangkutan.

Sumber Dana Belanja Pemerintahan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas : Pendapatan asli daerah: Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dana perimbangan: Merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-daerah

Pinjaman daerah: Merupakan salah satu sumber Pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. pembiayaan yang bersumber dari pinjaman harus dikelola secara benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah sendiri serta stabilitas ekonomi dan moneter secara nasional.

Lain-lain pendapatan yang sah: Merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Belanja Infrastruktur

Pengertian Belanja Infrastruktur

Menurut Halim (2008) mengatakan bahwa belanja infrastruktur merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengertian tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 dan Undang -

undang nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005, belanja infrastruktur merupakan pengeluaran anggaran oleh pemerintah yang sifatnya menambah inventaris atau menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi) dan digunakan untuk kepentingan umum. Undang - undang nomor 71 tahun 2010 mengatakan bahwa belanja infrastruktur merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Kemudian pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pasal 53 ayat 2 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja infrastruktur sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 53 ayat 4 bahwa Kepala Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan Belanja infrastruktur. Selain memenuhi batas minimal, pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi bersifat tidak rutin. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa belanja infrastruktur merupakan pengeluaran pemerintah yang berasal dari suatu anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya dimana aset tersebut dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja dalam mengemban tugasnya.

Hubungan Antara Variabel Belanja Infrastruktur dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dengan infrastruktur memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi. Salah satu pengaruh pertumbuhan ekonomi adalah infrastruktur seperti jalan yang memadai, adanya listrik, dan air bersih yang mencukupi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dalam hal ini sudah semestinya peran pemerintah sangatlah penting untuk mengatur, mengawasi dan mendukung dalam kegiatan-kegiatan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat hasil dan penentu dari pembangunan yang telah dilakukan sekaligus berguna untuk masa yang akan datang. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Desty Nurhidayanti (2014) bahwa infrastruktur berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi jika dari kebutuhan dasar infrastruktur mengalami penurunan maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan menunjukkan peningkatan sedangkan pertumbuhan yang negatif akan menunjukkan adanya penurunan. Maka dari itu pemerintah harus selalu memperhatikan pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor terutama dalam hal infrastruktur dasar (basic infrastructure). Infrastruktur itu sendiri juga sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat, antara lain jalan, air bersih dan listrik. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa infrastruktur air bersih, listrik dan jalan memiliki peranan penting dalam kebutuhan dasar manusia dan penentu dari laju pertumbuhan ekonomi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan regresi, regresi adalah metode statistik yang digunakan di bidang keuangan, investasi, dan disiplin ilmu lain yang berupaya menentukan kekuatan dan karakter hubungan antara satu variabel terikat (biasanya dilambangkan dengan Y) dan serangkaian variabel lain (dikenal sebagai variabel bebas). Disebut juga regresi sederhana atau kuadrat terkecil biasa (OLS), regresi linier adalah bentuk paling umum dari teknik ini. Regresi linier menetapkan hubungan linier antara dua variabel berdasarkan garis yang paling sesuai. Regresi linier digambarkan secara grafis menggunakan garis lurus dengan kemiringan yang menjelaskan bagaimana perubahan pada satu variabel berdampak pada perubahan pada variabel lainnya. Perpotongan y dari hubungan regresi linier mewakili nilai satu variabel ketika nilai variabel lainnya nol.

Model regresi nonlinier juga ada, namun jauh lebih kompleks. Analisis regresi adalah alat yang ampuh untuk mengungkap hubungan antar variabel yang diamati dalam data, namun tidak dapat dengan mudah menunjukkan sebab akibat. Ini digunakan dalam beberapa konteks dalam bisnis, keuangan, dan ekonomi. Misalnya, hal ini digunakan untuk membantu manajer investasi menilai aset dan memahami hubungan antara faktor-faktor seperti harga komoditas dan saham perusahaan yang menangani komoditas tersebut. Regresi sebagai suatu teknik statistik tidak boleh disamakan dengan konsep regresi terhadap mean (mean reversion). Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data supaya data lebih mudah diinterpretasikan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi sederhana untuk mengelolah dan membahas data yang telah diperoleh dan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Teknik analisis regresi dipilih dalam penelitian ini karena teknik analisis regresi sederhana dapat menyimpulkan secara langsung mengenai satu variabel dependen (Y) dan satu variabel independen (X). Sementara itu, model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

Dimana:

Y : Belanja Infrastruktur
X : Pertumbuhan Ekonomi

β : Koefisien Regresi
e : standarerror α : Konstanta

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara kian membaik. Tercatat bahwa ekonomi Kalimantan Utara tahun 2023 tumbuh sebesar 4,94 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya nilai tambah pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang menjadi sumber pertumbuhan utama adalah Pertambangan dan Penggalian. Pertambangan dan Penggalian juga merupakan lapangan usaha yang memberikan *share* terbesar dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Utara.

Secara spasial, di wilayah Pulau Kalimantan, kontribusi ekonomi Provinsi Kalimantan Utara masih yang terendah dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Perekonomian di Pulau Kalimantan masih didominasi oleh Provinsi Kalimantan Timur dengan *share* sebesar 48,38 persen. Sementara itu, *share* Provinsi Kalimantan Utara sebesar 8,45 persen. Inflasi (*year-on-year*) Desember 2023 Provinsi Kalimantan Utara (Gabungan Kota Tarakan dan Kota Tanjung Selor) sebesar 2,44 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan inflasi (*year-on-year*) pada Desember 2022. Penurunan ini dipicu penurunan harga terutama pada kelompok transportasi. Dari sisi perdagangan luar negeri, Provinsi Kalimantan Utara masih mengalami surplus sebesar 2.173,21 juta US Dolar pada tahun 2023. Permintaan ekspor naik 7,06 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Total ekspor melalui pelabuhan di Provinsi Kalimantan tahun 2023 mencapai 2.861,77 juta US Dolar. Sementara itu, nilai impor juga mengalami peningkatan. Nilai impor Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2023 mencapai 688,56 juta US Dolar. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan impor hasil industri, dari 165,81 juta US Dolar pada 2022 menjadi 589,98 juta US Dolar pada 2023. Selain itu, peningkatan ini juga didorong oleh impor hasil tambang dan hasil pertanian sebesar 3,46 juta US Dolar dan 1,17 juta US Dolar.

Membaiknya kinerja perekonomian memberikan dampak positif terhadap kondisi ketenagakerjaan. Bersarkan Survei Ketenagakerjaan Nasional yang diselenggarakan pada bulan Agustus, angka pengangguran menurun dari 4,33 persen pada 2022 menjadi 4,01 persen pada 2023. Selain berdampak pada kondisi ketenagakerjaan, membaiknya ekonomi Provinsi Kalimantan Utara juga mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional pada Maret 2023 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin menurun dari 6,77 persen pada 2022 menjadi 6,45 persen pada 2023. Salah satu indikator yang mencerminkan kinerja perekonomian suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan total dari nilai tambah yang tercipta dari seluruh aktivitas ekonomi. Dengan demikian, perubahan angka PDRB menunjukkan naik atau turunnya aktivitas perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 1. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Lapangan Usaha	Distribusi (%)
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	14,23
Pertambangan dan Penggalian	34,18
Industri Pengolahan	7,67
Pengadaan Listrik dan Gas	0,06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,05
Konstruksi	11,45
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,60
Transportasi dan Pergudangan	7,04
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,45
Informasi dan Komunikasi	2,46
Jasa Keuangan	1,09
Real Estate	0,61
Jasa Perusahaan	0,19
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,02

Jasa Pendidikan	2,28
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,94
Jasa Lainnya	0,67

Sumber: BPS Kaltara, 2024

Perkembangan APBD Provinsi Kalimantan Utara

Tabel 2. APBD Provinsi Kalimantan Utara 2021 – 2023

Jenis Pendapatan yang baru	Realisasi Pendapatan Pemerintah (Ribu Rupiah) (Ribu Rupiah)		
	2023	2022	2021
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	980,069,047.00	815,664,188.00	677,803,723.00
1.1 Pajak Daerah	717,253,715.00	596,780,850.00	392,686,405.00
1.2 Retribusi Daerah	17,390,165.00	7,053,750.00	6,212,686.00
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,114,672.00	9,088,203.00	8,205,702.00
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	235,310,494.00	202,741,385.00	270,698,928.00
2. Dana Perimbangan	2,080,287,939.00	1,908,970,208.00	1,890,949,863.00
2.1 Bagi hasil Pajak	113,955,476.00	122,010,301.00	141,163,908.00
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	575,824,133.00	444,503,627.00	243,360,751.00
2.3 Dana Alokasi Umum	1,117,056,619.00	1,080,588,578.00	1,077,878,230.00
2.4 Dana Alokasi Khusus	273,451,710.00	228,046,665.00	356,250,599.00
2.5 Dana Insentif Daerah	24,666,327.00	33,821,037.00	72,296,373.00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	717,243.00	6,857,420.00	40,748,257.00
3.1 Pendapatan Hibah	41,658.00	5,776,633.00	315,000.00
3.2 Dana Darurat	-	-	-
3.2 Emergency Fund	-	-	-
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	-	-	-
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
3.6 Lainnya	375,585.00	1,080,787.00	40,433,257.00
Jumlah	3,085,740,557.00	2,731,491,817.00	2,609,501,843.00

Sumber: BPS, 2024

Pembangunan Infrastruktur Provinsi Kalimantan Utara

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, mendukung ketahanan air dan kedaulatan pangan serta pemenuhan kebutuhan dasar di bidang permukiman dan perumahan. Disamping itu bertujuan mengurangi disparitas antara wilayah dan pemerataan hasil pembangunan. Pada Tahun 2022, Kementerian PUPR mengalokasikan dana sebesar Rp 1,18 Triliun yang diperuntukan bagi infrastruktur Bidang Sumber Daya Air sebesar Rp 209,07 Miliar, Bidang Bina Marga sebesar Rp 722 Miliar, Bidang Cipta Karya sebesar Rp 213,39 Miliar dan Bidang Perumahan sebesar Rp 40,94 Miliar.

Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia, pembangunan jalan perbatasan menjadi program prioritas pemerintah dalam rangka membuk keterisolasian daerah perbatasan dan meningkatkan konektivitas dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Barat selain fungsi pertahanan keamanan. Jalan perbatasan Indonesia dengan Malaysia yang ada di Pulau Kalimantan sepanjang 1.900 Km dimana 847 Km berada di Provinsi Kaltara. Pada tahun 2021, jalan perbatasan di Kaltara yang sudah tembus sepanjang 647,9 Km dan tahun 2022 ditargetkan bisa bertambah menjadi 672,7 Km. Dengan alokasi anggaran Rp 222 milyar tahun 2021, ruas-ruas jalan perbatasan yang ditangani yakni ruas Long Boh – Metulang – Long Nawang 5,4 Km dari total 29 Km melalui kontrak tahun jamak 2021-2022, ruas

Long Nawang – Long Pujungan 12 Km, Long Kemuat – Langap 12,8 Km, Long Bawan – Long Midang 3 Km, Mensalong – Tau Lumbis 15,2 Km dan Rehab/Rekon Malinau – Long Bawan 12 Km.

Konektivitas di Pulau Sebatik sebagai salah satu pulau terluar Indonesia secara bertahap juga mendapatkan penanganan dimana pada tahun 2021, Kementerian PUPR melakukan Preservasi Jalan Lingkar Sebatik sepanjang 77 km dengan biaya Rp 60,27 miliar dan rekonstruksi Jalan Lingkar Luar Sebatik sepanjang 800 meter dengan biaya Rp 18 miliar. Panjang jalan nasional di Provinsi Kaltara sendiri 585,16 Km dimana 82,10 persen dalam kondisi mantap. Kementerian PUPR terus melakukan penanganan baik pemeliharaan rutin maupun berkala sehingga kemantapannya ditargetkan mencapai 95 persen pada tahun 2022. Sementara itu, program strategis untuk mendukung kedaulatan pangan dan ketahanan air melalui pembangunan bendung dan jaringan irigasi, rawa dan tambak. Tahun 2017, dilakukan Pembangunan Sea Wall Pantai Amal Baru (Lanjutan), pembangunan Embung Rawa Sari Tahap II, pembangunan Intake dan Jaringan Transmisi Indulung Kota Tarakan, pembangunan Embung Serbaguna Pulau Bunyu Tahap I Kab. Bulungan, Embung Serbaguna Tanjung Agung (Lanjutan) Kec. Tanjung Palas Timur, pembangunan jaringan reklamasi rawa Sepunggur dan pembangunan lanjutan jaringan reklamasi rawa di daerah rawa Tanjung Buka, Teras Baru, dan Salimbatu.

Tabel 3. Analisis Regresi Linear Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.983	.040		2.511	.008
PE	.253	.092	.312	2.095	.42

a. Dependent Variable: Belanja Infrastruktur (APBD)

Sumber: data diolah di SPSS, 2024

Persamaan Regresinya sebagai berikut:

$$Y = 2,983 + 0,253 X + e$$

Angka-angka ini dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar untuk persamaan regresi berdasarkan perhitungan statistic diatas sebesar 2,983 artinya jika pembangunan infrastruktur (X) nilainya 0, maka pertumbuhan ekonomi (Y) nilainya tetap sebesar 2,983.
2. Indikator (X) memiliki koefisien positif sebesar 0,253 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu persen variabel pembangunan infrastruktur (X1), maka pertumbuhan ekonomi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,253 atau 25,3%.

Uji Koefisien Determinasi R²

Tabel 4. Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.723a	.523	.404	.71215

Sumber : Data diolah di SPSS, 2024

Dari hasil uji koefisien determinasi (R Square) dapat diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.723. Besarnya angka koefisien determinasi (R Square) 0.723 atau sama dengan 72,3% menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel independen yaitu pembangunan infrastruktur terhadap variabel dependen. Sedangkan sisanya 27,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara

Infrastruktur merupakan salah satu prasarana penting dalam pembangunan suatu daerah baik infrastruktur jalan, transportasi dan listrik. Hal ini karena fungsi strategis yang dimilikinya, yaitu sebagai penghubung antara satu daerah dengan daerah lain seperti jalan. Jalan sebagai penghubung sentra-sentra produksi dengan daerah pemasaran, sangat dirasakan sekali manfaatnya dalam rangka meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Data panjang jalan meliputi jalan Negara, jalan Provinsi, jalan Kabupaten dan jalan Desa serta keadaan dan permukaan jalan disuatu wilayah. Infrastruktur jalan sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi karna dengan adanya jalan faktor produksi akan terus berjalan, dan akan meningkatkan perekonomian yang baik.

Pembangunan infrastruktur jalan menunjukkan perbaikan, sehingga memperkecil pengeluaran suatu jasa pengantaran barang yang sebelumnya mahal menjadi lebih murah. Jika pengiriman sudah

murah maka dapat diraih harga barang menjadi turut murah. Efisiensi bahan bakar, serta meningkatkan pendapatan daerah setempat. Begitu pula dengan infrastruktur transportasi. Semakin baik suatu jaringan transportasi maka aksesibilitasnya juga semakin baik sehingga kegiatan ekonomi antar wilayah juga semakin berkembang. Transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan merupakan urat nadi dalam pembangunan ekonomi suatu Negara. Selain itu, Infrastruktur transportasi juga memiliki peran yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan dan ketersediaan infrastruktur transportasi di suatu Negara akan mempercepat proses pembangunan nasional maupun regional yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu infrastruktur listrik juga merupakan salah satu energi yang sangat diperlukan sebagai salah satu pendukung produksi dan kehidupan sehari-hari. Semakin majunya suatu wilayah, kebutuhan akan listrik menjadi tuntutan primer yang harus dipenuhi, tidak hanya untuk rumah tangga namun juga untuk kegiatan ekonomi terutama industri. Hampir disemua bidang kegiatan manusia membutuhkan manfaat energi listrik, baik untuk kegiatan rumah tangga, pendidikan, kesehatan, industri dan hampir semua kegiatan industri lainnya. Kegiatan ekonomi tentu juga sangat dibantu oleh kehadiran energi listrik. Di Provinsi Kalimantan Utara sendiri memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pabrik yang bergantung pada energi listrik seperti, fotocopy, jasa bordir, las listrik, mebel dan masih banyak lagi. Sehingga jika pemadaman listrik terjadi itu akan mengganggu produksi barang dan jasa dan juga akan meningkatkan biaya produksi. Produksi barang dan jasa ekonomi akan lebih efektif dan efisien dengan hadirnya alat-alat modern yang tentunya menggunakan energi listrik. Efektif dan efisiennya produktivitas barang dan jasa ekonomi ini tentunya akan meningkatkan output perekonomian secara signifikan, sehingga pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi program prioritas pemerintah provinsi Kalimantan utara yaitu perbaikan jalan, peningkatan transportasi dan pembangunan PLTA di kawasan Kayan Mentarang.

SIMPULAN

1. Pembangunan Infrastruktur baik sektor jalan, transportasi dan listrik memberikan dampak yang positif pada aspek sosial dan pembangunan manusia, dengan demikian pembangunan infrastruktur di provinsi Kalimantan utara bukan hanya sekedar pembangunan fisik tetapi juga merupakan strategi investasi dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2. Pembangunan infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Kalimantan utara yang telah dijelaskan sebelumnya. Artinya peningkatan atau penurunan pembangunan infrastruktur berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi di provinsi Kalimantan utara.

SARAN

1. Bagi pemerintah, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan adanya sebuah upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan ekonomi terutama sektor infrastruktur untuk semua seperti jalan, transportasi dan lainnya.
2. Bagi akademisi, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebuah bahan referensi untuk kegiatan mengajarnya ataupun penelitiannya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, salah satu kelemahan dalam penelitian ini adalah keterbatasan peneliti dalam memperoleh data, seperti data panjang jalan dan transportasi (banyaknya mobil angkutan barang dan penumpang) yang hanya diperoleh data pertahun saja dalam jangka waktu 6 tahun. Sehingga penelitian selanjutnya diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik.

REFERENSI

- Adi widyandana, 2022. Kajian Fiskal Regional Kalimantan Utara.
- Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Case & Fair .2007 . Prinsip-prinsip ekonomi jilid 1, Jakarta : Erlangga.
- Chaerunnisa Nurhidayanti Desty. 2014. Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Sukabumi: Periode Tahun 1990-2012. Jurnl Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
- Dyah Amalia. (2019). Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- Firdaus Finuliyah, Moh Khusani. (2022). Pendapatan Asli Daerah, Belanja Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Antar Wilayah.
- Hulten, C. R. dan R. M. Schwab. 1991. Public Capital Formation and the Growth of the Regional Manufacturing Industries. Penelitian. National Tax Journal, 40, 121-122
- <https://kaltara.bps.go.id/id> diakases pada tanggal 2 Mei 2024
- <https://kaltara.bpk.go.id/> diakases pada tanggal 2 Mei 2024

- <http://poskotanews.com2014/11/25/ketersediaan-air-berkualitas-erat-kaitannya-dengan-pertumbuhan-ekonomi/> diakses pada tanggal 2 Mei 2024
- <https://www.kompasiana.com/bob911/59b5fa3408d31977e1730b2/listrik-sebagai-driver-pertumbuhan-ekonomi>, diakses pada tanggal 2 Mei 2024
- <https://www.ocbc.id/id/article/2023/02/08/teori-pertumbuhan-ekonomi>, diakses pada tanggal 2 Mei 2024
- Jhingan, M.L., et al. Terbitan: (2008) The economics of development and planning; Lihat Juga. Ekonomi pembangunan dan perencanaan.
- Jussara Riska Amelya, Jean Elikal Marna. (2023). Pengaruh Infrastruktur Ekonomi Dan Infrastruktur Sosial Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Kawasan Timur Tahun 2011-2020 (Studi Kasus 16 Provinsi Di kawasan Timur Indonesia).
- Mankiw, N. Gregory. 2003. Teori Makro Ekonomi, Jakarta : Erlangga.
- Ni Wayan Diah Mia Kusuma Dewi, Made Heny Urmila Dewi. (2021). Pengaruh Belanja Daerah Dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi.
- NSS, Rr. Lulus Prapti, Edy Suryawardana, and Dian Triyani. 2015. "Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang." Jurnal Dinamika Sosial Budaya 17 (1): 82. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i1.505>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021- 2025
- Sadikin sjuuib, Hannan, Ulya sunani. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Ulumanda.
- Sukirno. 2010. Makroekonomi. Teori Pengantar. Edisi Ketiga. PT. Raja Grasindo Perseda. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara